

IV KESIMPULAN

Bab ini memuat tentang bagaimana pemaknaan modernisasi kota Semarang yang dilakukan oleh pemerintah kolonial kota Semarang sejak era liberal sampai era etis. Saya mulai dari latar belakang kota Semarang dimodernisasi. Segregasi di kota Semarang pada fokus periode penelitian saya (1870-1940), dengan tiga kelompok masyarakat etnis yang menjadikan pemaknaan kota Semarang oleh masing-masing kelompok etnis berbeda. Pemahaman modernitas oleh tiap kelompok etnis yang berbeda menjadikan kota Semarang menjadi arena kontestasi merujuk pada pendekatan dialektika sosio-spasial (*Socio-Spatial Dialectic*).

Kelompok etnis Eropa, China dan, Bumiputera melakukan pemahaman atas kota Semarang sesuai dengan kepentingan dan kemampuan yang mereka miliki dalam menafsirkan. Hal ini berbenturan dengan kebijakan pemerintah Kolonial Kota Semarang yang memordenisasi kota Semarang sebagai bagian dari semangat liberal dan etis yang menjadi arus utama dunia saat itu. Masing-masing melakukan strategi pendominasian dan perlawanannya, kota Semarang sebagai *firstspace* (ruang yang dikenal oleh pancaindera), dan *the secondspace* sebagai keseluruhan ide, pemikiran, imajinasi warga beragam etnis, kelas masyarakat dan penguasa kota tentang Semarang, *the thirdspace* adalah pertemuan antara kota Semarang sebagai *firstspace* dan *secondspace*; dengan kata lain Semarang adalah ruang dipraktikkannya strategi untuk memaknai kota Semarang.¹ Kontestasi memaknai ruang kota Semarang itulah sebagai *the thirdspace*.

Pemerintah kolonial kota Semarang memandang kota harus dimodernisasi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditumpukan pada kegiatan ekonomi dengan orientasi keuntungan serta sistem segregasi ras. Dengan dimodernisasi, kota dapat dipandang sebagai sebuah tempat yang memungkinkan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat melakukan kontrol atas apa yang menjadi komoditas ekonomis. Pada era Etis, segregasi ras mulai dihapuskan, kebijakan ini menjadikan ekonomi sebagai faktor segregasi baru yang mengatur kehidupan warga kota.

¹ Mengenai *firstspace*, *secondspace*, dan *thirdspace*, lihat Bab I halaman 13-15.

Sehingga modernisasi menjadi pemahaman yang dibangun oleh pemerintah kota kolonial Semarang melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat, antara pembangunan perumahan Gementee agar lingkungan bersih, nyaman, aman dan, sehat. Pembubaran *Kongkoan* di kelompok masyarakat etnis China agar sistem birokrasi menjadi tunggal dan efisien.

Kelompok Eropa memandang modernisasi sebagai bentuk perluasan permukiman yang harus nyaman, bersih dan terbebas dari segregasi ras. Sebagai kelompok yang mengkolonisasi (*colonizer*), kelompok masyarakat etnis Eropa memandang kota sebagai miliknya. Meskipun dalam pelaksanaannya, kelompok Eropa harus berhadapan dengan kelompok masyarakat etnis lain yaitu China dan Bumiputera. Dalam ide pembangunan kawasan permukiman baru kelompok Eropa tidak sedikit dalam mengeluarkan biaya, hal ini juga dengan dengan cara mempengaruhi pemerintah kota untuk turut membiayai serta menghadapi konflik dari kelompok China. Hubungan antara kelompok Eropa dan pemerintah kolonial kota Semarang yang memandang kota sebagai lingkungan yang nyaman dan bersih dalam pemahaman Eropa membuat kebijakan pembangunan perumahan sangat agresif dilakukan oleh Gementee. Pembangunan perumahan oleh Gementee inilah yang merupakan dominasi pemahaman atas kota oleh kelompok Eropa yang didukung oleh pemerintah kolonial kota Semarang. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah kolonial kota berkepentingan akan pajak serta sewa rumah yang menjadi kas kota. Di samping itu pemerintah kota juga diuntungkan dengan loyalitas pegawai-pegawai dari kalangan Bumiputera yang menjadi kelompok baru atau *priyayi* baru dalam masyarakat kota Semarang.

Sedangkan kelompok China memandang modernisasi sebagai usaha untuk dapat leluasa berdagang serta dapat sejajar dengan kelompok Eropa. Kaum Bumiputera, memandang secara bahwa modernisasi merupakan usaha untuk menumbuhkan kesadaran berfikir dan masuk dalam hubungan-hubungan lembaga yang menjadi penyeimbang pemerintahan Kota. Dibubarkannya *Kongkoan* oleh pemerintah kolonial, menimbulkan kekhawatiran kelompok etnis China, hal ini karena *Kongkoan telah* dipandang sebagai sebuah lembaga yang menjadi pelindung kelompok etnis China. Kebijakan kebijakan pemerintah kota yang mendukung usaha permukiman di sikapi oleh kelompok China dengan menginvestasikan instrument

keuangannya pada badan pengelola perumahan Gementee, NV. *Volkhuysvesting*. Meskipun kelompok etnis China mengalami pengurangan asset tanah akibat pembangunan perumahan ini, namun investasi pada badan pengelola perumahan menjadikan kelompok etnis China tetap menjadi yang dominan dalam dinamika komoditas ekonomi baru di kota Semarang, yaitu perumahan atau tempat tinggal. Pada bidang pendidikan, kelompok etnis China yang tidak termasuk pada kebijakan etis, melakukan usaha swadaya untuk membuat sekolah mandiri yang pada akhirnya dapat memaksa pemerintah mengadakan kebijakan pendidikan bagi kelompok etnis China serta melegalkan lembaga pendidikan mandiri yang sudah ada.

Bagi kelompok masyarakat Bumiputera, yang dominan secara jumlah tetapi menjadi kelompok yang dikolonisasi (*colonized*) melakukan resistensi dengan cara menjadi bagian warga kota yang berada pada tingkatan buruh pekerja pada era liberal. Pada era etis, resistensi kelompok masyarakat Bumiputera dilakukan melalui kebijakan *medezgenschap* (kepemilikan hak suara) oleh pemerintah kolonial. Akibatnya mobilisasi kelompok masyarakat etnis Bumiputera pada bidang pendidikan dan masuknya menjadi dewan kota telah didominasi oleh kecenderungan dan pengaruh kelompok masyarakat Bumiputera serta kelompok *Indo* dan *Peranakan*. Pemahaman kelompok Bumiputera akan kota sebagai tempat yang telah direbut oleh pihak *colonizer* dan harus direbut kembali, tercermin dari sebagian sikap kelompok masyarakat Bumiputera yang bergerak menghuni perumahan yang dibangun oleh Gementee. Sedangkan sikap lainnya ditunjukkan dengan menghuni wilayah-wilayah diluar kawasan perumahan yang disebut kampung.

Kontestasi geografis antara pemerintah Kolonial Kota Semarang, etnis Eropa-China-Bumiputera melahirkan pemilahan pada perebutan sumber-sumber penguasaan warga kota, tanah dan pemikiran serta cara bersikap terhadap kota atas aspek produksi dan jasa yang terkait erat dengan produktifitas kota. Kelompok etnis Eropa memaknai kota Semarang sebagai kota yang menjadi “rumah kedua” yang harus nyaman; sama seperti di kerajaan induk. Sementara itu kelompok etnis China memaknai kota Semarang secara ambigu antara makna negeri dan tanah air, sedangkan kelompok masyarakat etnis Bumiputera memandang kota Semarang sebagai kesatuan *laku urip*, sebuah *tlatab* yang harus dipertahankan sebagai daerah asal. Dihapusnya *kongkoan* pada kelompok masyarakat etnis China, dikukuhkannya